



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : IWAN MUHAMAD RAMDAN
NIK : 6471040709750003
Lembaga : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
Unit Kerja : UNIVERSITAS MULAWARMAN
Sub Unit Kerja : FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Jabatan : DEKAN
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 8 Januari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MULAWARMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN MUHAMAD RAMDAN
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 762866

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 252.820.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/160 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. Tanah Seluas 196 m2 di KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 127.400.000
3. Tanah Seluas 340 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 420.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 170.000.000

1. MOBIL, SUZUKI KATANA MOBIL PENUMPANG Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VIOS MOBIL PENUMPANG Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 70.896.203

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 493.716.203

III. HUTANG

Rp. 350.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 143.716.203

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.